

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004, Kabupaten Lamongan mengalami perbedaan kinerja keuangan di masa sebelum otonomi dan sesudah otonomi daerah. Perbedaan tersebut adalah perbedaan positif, karena kabupaten Lamongan mengalami kenaikan kinerja keuangannya. Di masa sebelum otonomi rata-ratanya hanya berkisar 11,3%, sedangkan di masa sesudah otonomi daerah rata-ratanya mencapai 122,86%. Kenaikan rata-ratanya sebesar 101,57%.
2. Berdasarkan dari hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap PAD Kabupaten Lamongan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004, Kabupaten Lamongan tidak mengalami perbedaan kinerja keuangan di masa sebelum otonomi dan sesudah otonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan gambaran kabupaten Lamongan hanya mengalami kenaikan rata-rata kurang dari 10% hanya sebesar 0,8% saja. Di masa sebelum otonomi rata-ratanya hanya berkisar 5,86%, sedangkan di masa sesudah otonomi daerah rata-ratanya mencapai 6,66%. Kenaikan rata-ratanya sebesar 0,8%.

3. Berdasarkan dari hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap BHPBP Kabupaten Lamongan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004, Kabupaten Lamongan tidak mengalami perbedaan kinerja keuangan di masa sebelum otonomi dan sesudah otonomi daerah. Hal ini digambarkan kabupaten Lamongan di masa sebelum otonomi rata-ratanya berkisar 8,5%, sedangkan di masa sesudah otonomi daerah rata-ratanya hanya mencapai 5,76%. Penurunan rata-ratanya sebesar 2,74%.
4. Berdasarkan dari hasil perhitungan rasio upaya fiskal Kabupaten Lamongan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004, Kabupaten Lamongan tidak mengalami perbedaan kinerja keuangan di masa sebelum otonomi dan sesudah otonomi daerah. Hal ini digambarkan kabupaten Lamongan di masa sebelum otonomi rata-ratanya berkisar 101,05%, sedangkan di masa sesudah otonomi daerah rata-ratanya hanya mencapai 107,76%. Kenaikan rata-ratanya sebesar 6,71%.
5. Berdasarkan dari hasil rasio pertumbuhan terhadap PAD Kabupaten Lamongan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004, Kabupaten Lamongan mengalami perbedaan kinerja keuangan di masa sebelum otonomi dan sesudah otonomi daerah. Hal ini digambarkan kabupaten Lamongan di masa sebelum otonomi rata-ratanya berkisar 9,59%, sedangkan di masa sesudah otonomi daerah rata-ratanya mencapai 52,94%. Kenaikan rata-ratanya sebesar 43,35%.

6. Berdasarkan dari hasil rasio pertumbuhan terhadap TPD Kabupaten Lamongan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004, Kabupaten Lamongan mengalami perbedaan kinerja keuangan di masa sebelum otonomi dan sesudah otonomi daerah. Hal ini digambarkan kabupaten Lamongan di masa sebelum otonomi rata-ratanya berkisar 18,06%, sedangkan di masa sesudah otonomi daerah rata-ratanya mencapai 35,41%. Kenaikan rata-ratanya sebesar 17,35%.
7. Berdasarkan dari hasil rasio pertumbuhan terhadap BR Kabupaten Lamongan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004, Kabupaten Lamongan mengalami perbedaan kinerja keuangan di masa sebelum otonomi dan sesudah otonomi daerah. Hal ini digambarkan kabupaten Lamongan di masa sebelum otonomi rata-ratanya berkisar 49,39%, sedangkan di masa sesudah otonomi daerah rata-ratanya mencapai 21,27%. Penurunan rata-ratanya sebesar 28,12%.
8. Berdasarkan dari hasil rasio pertumbuhan terhadap BP Kabupaten Lamongan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004, Kabupaten Lamongan mengalami perbedaan kinerja keuangan di masa sebelum otonomi dan sesudah otonomi daerah. Hal ini digambarkan kabupaten Lamongan di masa sebelum otonomi rata-ratanya berkisar 13,44%, sedangkan di masa sesudah otonomi daerah rata-ratanya mencapai 73,33%. Kenaikan rata-ratanya sebesar 59,89%.
9. Berdasarkan dari hasil rasio keserasian terhadap BR Kabupaten Lamongan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004, Kabupaten Lamongan tidak mengalami perbedaan kinerja keuangan di masa sebelum otonomi dan sesudah otonomi daerah. Hal ini digambarkan kabupaten Lamongan di masa

sebelum otonomi rata-ratanya berkisar 55,57%, sedangkan di masa sesudah otonomi daerah rata-ratanya mencapai 55,7%. Kenaikan rata-ratanya sebesar 0,13%.

10. Berdasarkan dari hasil rasio keserasian terhadap BP Kabupaten Lamongan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004, Kabupaten Lamongan tidak mengalami perbedaan kinerja keuangan di masa sebelum otonomi dan sesudah otonomi daerah. Hal ini digambarkan kabupaten Lamongan di masa sebelum otonomi rata-ratanya berkisar 44,43%, sedangkan di masa sesudah otonomi daerah rata-ratanya mencapai 44,3%. Penurunan rata-ratanya sebesar 0,13%.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan masih memiliki banyak keterbatasan. Adapun keterbatasan yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Periode penelitian yang digunakan masih terbatas selama 5 tahun sesudah otonomi dan 5 tahun sesudah otonomi daerah, karena penulis mengalami keterbatasan data penelitian.
- 2) Jumlah unit analisis yang diteliti juga terbatas, hanya meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, upaya fiskal, pertumbuhan, dan keserasian.
- 3) Unsur-unsur yang terdapat dalam PAD masih mengandung unsur SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

- 4) Penelitian ini hanya dilakukan pada satu kabupaten saja, yaitu kabupaten Lamongan.

5.3 **Saran**

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan di atas masih banyak terdapat kekurangan dan belum sempurna. Untuk itu penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan di atas mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten Lamongan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Sektor pajak di kabupaten Lamongan belum menjadi sektor yang diprioritaskan dalam rangka peningkatan PAD, sehingga sektor pajak belum tergali dan dikelola secara optimal, maka diperlukan adanya upaya peningkatan PAD, dengan cara :
 1. Pemerintah daerah seharusnya dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang – peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat digali.
 2. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak, dengan cara : Melakukan pendataan kembali kepada wajib pajak dan objek pajak yang sudah ada untuk penggalan potensi yang dimiliki oleh daerah.
 3. Meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan, sehingga tindakan kebocoran dapat diminimalisir.
- 2) Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap agar dapat meneliti lebih lengkap lagi mengenai unsur-unsur perkembangan dalam APBD, sehingga

nantinya akan memperoleh hasil analisis yang lebih lengkap dan kompleks lagi dengan menggunakan alat analisis yang lengkap dan menambahkan obyek dalam penelitian sehingga tidak pada satu kabupaten saja.

- 3) Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap agar dapat meneliti lebih lengkap tentang subyek yang akan diteliti. Misalnya mengenai kualitas layanan publik.
- 4) Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap agar penelitiannya dilengkapi dengan indikator kinerja pada organisasi pemerintahan
- 5) Peneliti berharap agar penelitian berikutnya dapat menambahkan data penelitian yang lebih lengkap lagi, sehingga tidak hanya melakukan analisis kinerja keuangan daerah dalam jangka waktu 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah otonomi daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Djoko Harmantyo. 2007. Pemekaran Daerah dan Konflik Keuangan. *Jurnal Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia Vol 11 No 1 April*.
- Gideon, Priyo. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama*.
- Haryati, Sri. 2006. “Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000 dan 2001-2003”. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Muhammad, Karya Satya Azhar. 2008.” *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Atau Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*”. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Undang-Undang Otonomi Daerah 2004, Penerbit Absolut.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- www.ekonomirakyat.org . Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah.
- <http://jatim.bps.go.id> . Peringkat Produksi Padi, Jagung, Dan Kedelai Di Jawa Timur.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. Data Keuangan Dari Tahun 1995 sampai dengan tahun 2004.